

ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR



Oleh

Nama : Redo Mulyadi
No. Mahasiswa : 02312241

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2007

**ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan guna memenuhi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada**

Fakultas Ekonomi UII

Oleh

Nama : Redo Mulyadi

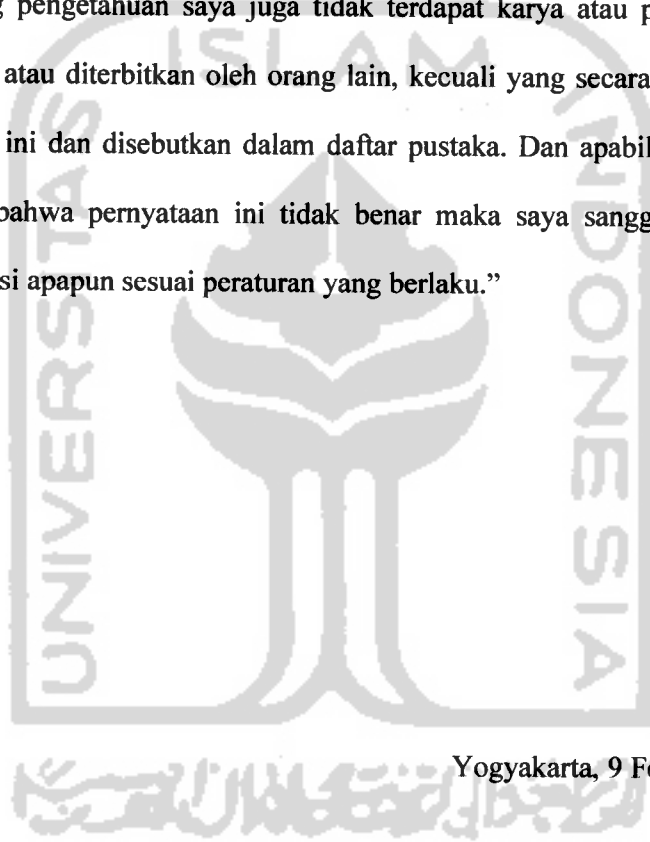
No. Mahasiswa : 02312241

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 9 Februari 2007

Redo Mulyadi

ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR

Hasil penelitian

Diajukan oleh

Nama : REDO MULYADI

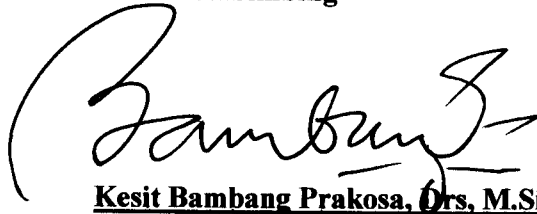
No. Mahasiswa : 02312241

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada tanggal.....

Dosen Pembimbing



Kesit Bambang Prakosa, Drs, M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

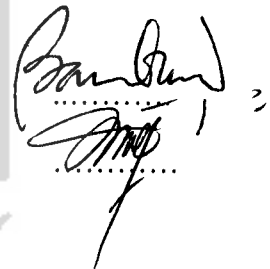
Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Pemungutan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur

Disusun Oleh: REDO MULYADI
Nomor mahasiswa: 02312241

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 12 Maret 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Dra. Neni Meidawati, M.Si, Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmaul Ishak, M.Bus, Ph.D

MOTTO

Pastikanlah bahwa kepala Anda tidak lebih tinggi dari topi Anda.

Vergill

*Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras
adalah kemenangan yang hakiki*

Mahatma Gandhi

*Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika
kesempatan bertemu dengan kesiapan.*

Thomas A. Edison

Vouloir, c'est Pouvoir (Where there is a will, there is a way)

Persembahan



*Skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta,
Ayah, Ibu, adikku Rika dan Tomi,
serta keluarga besarku*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, pujian yang sempurna penulis haturkan ke hadirat sang penguasa kemuliaan, Allah SWT, atas karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga skripsi yang berjudul ” **ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR** ” ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada FE UII. Tak lupa shalawat teriring salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah S.A.W.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Asma'i Ishak selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII.
2. Ibu Erna Hidayah selaku ketua jurusan Akuntansi FE UII
3. Bapak Kesit Bambang Prakosa selaku dosen pembimbing skripsi
4. Ayahanda dan ibunda tercinta yang setiap saat selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini, little brother tomi dan semua keluarga besar di Bengkulu.
5. Om Suryadi yang sudah memberikan banyak support dan ilmunya untuk pengerjaan skripsi ini. Tanpa beliau skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

6. Keluarga Dayu Permai : sweetly sista Rika, thanks tuk ucapan terima kasihnya. Abang Heru, teman midnight di 21. Karisma, tuk antaran makanan dan mottonya.
7. Reza, yang telah banyak membantu dan memberikan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cepat
8. All of my friend, Rahmat, Teuku, Nino, Ridwan (Koh), Indie a.k.a Women Lover, Yayan, Aat, Fandi, Barkah, Yoga, Yuda , Mas Awan, My lovely Indah , My Sweetly Nihayah (Menyut), Zohri, Roni,
9. Haris, Vicka (Pariz) and all of crew Q Radio
10. Pihak – pihak lain yang telah membantu selama proses pengerjaan skripsi ini.

Akhirul kalam, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan para pembaca lainnya. Amin

Yogyakarta, 9 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7

2.1.1	Asas dan Tolok Ukur Hasil	7
2.1.2	Pengertian pajak	10
2.1.3	Fungsi pajak.....	10
2.1.4	Teori-teori Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5	Kewajiban Yang Bersifat Umum.....	12
2.1.6	Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya.....	14
2.1.7	Sistem pemungutan pajak.....	16
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	17
 BAB III. METODE PENELITIAN		
3.1	Obyek/Subyek Penelitian	19
3.2	Data Penelitian.....	19
3.3	Teknik Pengumpulan Data	20
3.4	Analisis Data	20
3.4.1	Mengukur Efisiensi.....	21
3.4.2	Mengukur Efektifitas	21
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian	24
4.2	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	25
4.2.1	Mengukur Efisiensi.....	25
4.2.2	Mengukur Efektifitas	27

5.1	Kesimpulan.....	29
5.2	Keterbatasan Penelitian	32
5.3	Saran	32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 4.1. Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur 26
- Grafik 4.2. Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur 28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2003.....	35
2.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2004.....	36
3.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2005.....	37
4.	Biaya Pungutan Pajak.....	38
5.	Permohonan Ijin Penelitian.....	39



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur. Data yang diambil adalah rekapitulasi target, realisasi dan biaya penerimaan pajak tahun anggaran 2003/2004 sampai tahun 2005. Analisis efisiensi dalam pengujian ini menggunakan metode *Nick Devas* dengan melakukan perbandingan antara biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Analisis efektifitas selanjutnya dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2003/2004 sampai dengan tahun 2005 efisien, sedangkan tingkat efektifitas dari tahun 2003/2004 sampai dengan tahun 2004 kurang efektif dan mengalami peningkatan menjadi sangat efektif pada tahun 2005.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor perpajakan memegang peranan penting dan strategis dalam penerimaan negara. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan salah satunya dengan membayar pajak. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Bila dilihat secara global, kontribusi pajak yang besar tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara yang memberlakukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Keadaan ini kelihatannya tidak terlepas dari ciri, sifat serta keberadaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang tergolong stabil, tidak mudah goyah maupun tidak fluktuatif, walaupun dalam kondisi perekonomian yang labil.

Dampak dari krisis moneter berpengaruh di semua sektor perekonomian. Demikian pula dengan penerimaan negara khususnya di sektor pajak. Dengan target yang semakin meningkat maka para aparat dituntut untuk terus menggali potensi perpajakan yang ada untuk memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan. Namun dapat ditambahkan bahwa gambaran potensi penerimaan pajak tidaklah sepenuhnya tergambar dalam realisasi penerimaan pajak KPP Sidoarjo Timur, karena sebagian dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo berstatus PMA dan terdaftar di KPP PMA, sedangkan perusahaan-

perusahaan besar yang telah mapan beralih status menjadi perusahaan publik dan terdaftar di KPP PMB (Perusahaan Masuk Bursa) dan beberapa beralih menjadi wajib pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar (Suryadi, 2004).

Pajak yang merupakan perpindahan sebagian kekayaan atau harta yang dimiliki masyarakat (*privat*) kepada negara (*public*), yang prosesnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum (yuridis) yang berlaku yaitu pasal 23 ayat 2 UUD 1945, mempunyai karakteristik tersendiri. Ciri khas ini pulalah yang membedakannya dengan jenis penerimaan atau jenis pemungutan negara lainnya. Namun dalam pemungutan yang dilakukan melalui Direktorat Jendral Pajak dalam memenuhi target penerimaan APBN tidak hanya bergantung pada kinerja aparat pajak saja. Tetapi diperlukan kerjasama dan bantuan segenap lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat wajib pajak, hendaknya perlu ikut serta bahwa peran serta dan partisipasinya merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan. Ekstensifikasi pajak bukan saja tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pengelola sumber penerimaan negara dari pajak, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Jenis-jenis pajak pusat yang ditangani oleh KPP Sidoarjo Timur adalah Pajak Penghasilan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 Impor, Pasal 23, Pasal 25/29 OP, Pasal 25/29 Badan, Pasal 26, Final dan FLN, Non Migas Lainnya). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Barang Mewah (PPN Dalam Negri, PPN Impor , PPnBM Dalam Negri, PPnBM Impor, PPN/PPnBM lainnya) serta Pajak Lainnya (Bea Materai, Bunga Penagihan PPh dan Bunga Penagihan PPN).

Efisiensi merupakan perbandingan antara pengeluaran terhadap pemasukan atau jumlah hasil keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan. Sedangkan efektifitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pungutan pajak (Devas Nick, 1999). Biaya yang dimaksud adalah biaya operasional yang terjadi di KPP Sidoarjo Timur yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai oleh KPP yang bersangkutan.

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Target penerimaan pajak untuk tahun berikutnya didapatkan dengan melihat data realisasi tahun lalu dan kemudian dilakukan pendataan lagi terhadap wajib pajak yang baru untuk menghitung estimasi pajaknya.

Sebelumnya penelitian tentang pajak juga telah dilakukan oleh Eka Febriana pada tahun 2004 dengan judul "*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak, Studi Kasus Di KPP Kebumen, selanjutnya penelitian dengan judul* " Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Salatiga oleh Dadang Basuki pada tahun 2004.

Melihat pentingnya efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak bagi penerimaan negara dan permasalahan yang berbeda-beda yang dihadapi tiap daerah maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam skripsi ini dengan judul :

**“ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR”.**

1.2 BATASAN MASALAH

Membatasi pada masalah efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak di KPP Sidoarjo Timur untuk tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan 2005.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh KPP Sidoarjo Timur selama ini telah efisien?
2. Apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh KPP Sidoarjo Timur selama ini telah efektif?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

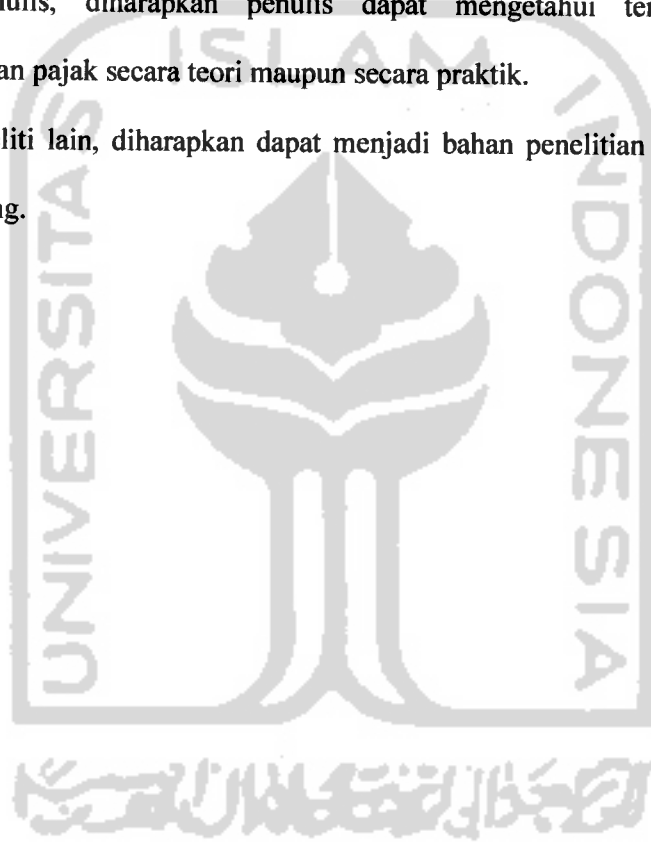
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menilai efisiensi pemungutan pajak di KPP Sidoarjo Timur dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara.
2. Menilai efektivitas pemungutan pajak di KPP Sidoarjo Timur dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi KPP, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak secara efektif dan efisien.
2. Bagi penulis, diharapkan penulis dapat mengetahui tentang praktik pemungutan pajak secara teori maupun secara praktik.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang.



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan tentang landasan teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, sumber data, yang digunakan dan pengukurannya.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan proses bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Asas dan Tolok Ukur Hasil

Ada tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran yang dikenal, yaitu : upaya pajak, hasil guna (*Effectiveness*) dan daya guna (*Efficiency*). Upaya pajak lebih banyak menyangkut sistem pajak bersangkutan secara keseluruhan daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak.

a. Upaya Pajak

Hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah bersangkutan. Pengukur yang lazim digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ; tetapi terhadap ini ada beberapa keberatan: *pertama*, PDRB mungkin murni mencerminkan pendapatan bersih daerah itu (misalnya, sebagian besar pendapatan bersangkutan mungkin jatuh ketangan pengusaha yang tidak tinggal di daerah itu); *kedua*, tidak semua kegiatan ekonomi di suatu daerah mudah dibebani pajak (misalnya produk minyak bumi di Indonesia); dan *ketiga*, data PDRB itu sendiri meragukan. Juga, ukuran ini berpijak pada anggapan pemerintah daerah memiliki wewenang mengenakan pajak dan menetapkan tarif pajak.

b. Hasil Guna

Mengukur antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing, dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing.

Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak : menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna : menghindari pajak (oleh wajib pajak), kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang, dan penipuan oleh petugas pajak.

Menentukan Wajib Pajak : haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya.

Menetapkan Nilai Pajak Terhutang : nilai pajak terhutang harus ditentukan dengan cermat, dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar.

Memungut Pajak : Memungut pajak terhutang pada waktunya dapat lebih mudah : bila pembayaran bersifat otomatis, bila pembayaran dapat dipancing, dan bila ancaman hukuman atas kelalaian membayar pajak cukup berat dan ada kemungkinan ditegaskan sehingga dapat berlaku sebagai alat untuk menakut-nakuti.

Pemeriksaan Kelalaian Pajak. Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik,

dalam arti kelalaian pajak dapat segera di ketahui dari situ, dan dalam arti dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah lain.

Prosedur Pembukuan yang Baik : Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang di pungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan.

c. Daya Guna

Hal ini mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak, dan sebagainya) dan mungkin juga mencakup biaya luar yang terdiri dari biaya memtuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat, dan sebagainya.

Daya guna juga akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan di tekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

Hasil Guna (*Effectiveness*) dan Daya Guna (*Efficiency*) Kegiatan Daerah :
Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya (Nick Devas, 1989)

2.1.2 Pengertian Pajak

Dasar pemungutan pajak di Indonesia ditetapkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945. " Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".

Sedangkan pengertian pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Rochmat Soemitro, Prof.Dr.)

Menurut Adriani : pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini perlu diberikan pengertian tentang beberapa kewajiban yang bersifat umum dalam KUP.

2.1.3. Fungsi Pajak

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu : (Kesit Bambang Prakosa, 2006)

a. Fungsi Budgeter

Hasil pemungutan pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan, membuka lapangan kerja, membayar gaji pegawai negeri sipil, dsb.

b. Fungsi Reguler

Pajak dipungut untuk mendorong kegiatan investasi, mencegah konsumsi barang tertentu, membatasi pola konsumtif, menekan laju inflasi.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak dipungut kepada semua lapisan masyarakat sebagai wujud bentuk untuk menegakkan keadilan sosial, dengan diwujudkan dalam struktur tarif progresif.

2.1.4 Teori-teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu tertentu dan negara bertugas untuk melindungi orang-orang dan dalam segala kepentingannya, tetapi tidak menanggung kerugian yang dialami warganya.

Contoh : keselamatan dan keamanan

b. Teori Kepentingan

Pajak harus dipungut dari masyarakat berdasar kepentingan masing-masing penduduk dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk juga perhitungan terhadap jiwa dan harta bendanya.

Contoh : perlindungan atas jiwa orang-orang tersebut serta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Pemungutan pajak didasarkan pada manfaat yang dinikmati oleh masyarakat atas jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya.

Contoh : kenikmatan

d. Teori Bakti

Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya, rakyat membayar pajak karena merasa (bentuk tanda) berbakti kepada negara. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara.

e. Teori Daya Beli

Penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajaknya, bukan kepentingan individu maupun negara melainkan kepentingan masyarakat.

2.1.5 Kewajiban Yang Bersifat Umum

Ada beberapa kewajiban yang tercantum didalam KUP. Bila kita telaah lebih dalam maka pada dasarnya kewajiban yang bersifat umum yang diatur dalam KUP antara lain adalah: (Drs. Muqodim, MBA, Ak)

a. Kewajiban mendaftarkan diri

Setiap wajib pajak, wajib potong dan wajib pungut diwajibkan mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan yang nantinya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Kewajiban pembukuan

Pembukuan yang dimaksud adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

c. Kewajiban menghitung dan membayar pajak

Setiap wajib pajak, menghitung sendiri, memperhitungkan dan membayar pajak yang terhutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

d. Kewajiban melaporkan pajak

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan. Surat tersebut oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak

dan atau bukan obyek pajak dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Kewajiban memberikan keterangan

Atas permintaan Direktorat Jendral Pajak, setiap wajib pajak diwajibkan memberikan keterangan kepada petugas pemeriksa (tax auditor) bila dilakukan pemeriksaan pajak. Mereka juga diwajibkan membantu mempermudah pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.

f. Kewajiban merahasiakan

Setiap aparat pajak, petugas, pejabat, para ahli serta pihak-pihak yang ditunjuk membantu pelaksanaan perundang-undangan pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak mengenai segala sesuatu yang diketahui atau telah diberitahukan kepada nya oleh wajib pajak. Kewajiban merahasiakan ini ditiadakan apabila dilakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan.

2.1.6 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya. (Waluyo dan Wirawan, 2002).

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan pajak didasarkan keadaan material objektif wajib pajak.

Contoh : Subjek PPh

- Orang Pribadi dan warisan belum terbagi
- Badan

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak

Contoh : Objek PPh

- Dipungut karena keadaan : PBB, PKB
- Dipungut karena perbuatan : Bea Materai, Cukai, PPh Undian, dsb.

c. Menurut Pemungutan

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : (Kesit Bambang Prakosa, 2006)

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri wajib pajak sendiri.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Secara umum terdapat dua sistem yang berhubungan dengan pengenaan, penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak, yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. Guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, pengenaan, penghitungan, penetapan dan pembayaran pajak, diantara kedua sistem tersebut terdapat satu sistem lagi yang secara aktif dilakukan oleh pihak ketiga (pihak lain) yaitu dengan cara melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas lawan transaksinya (masyarakat). Sistem pemotongan dan pemungutan ini dikenal dengan sebutan *withholding system* (Pandiangan, 2002).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dadang Basuki (2004) menyimpulkan bahwa:

1. Pemungutan PPh dan PPN di KPP Salatiga selama tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002 belum seluruhnya efektif.
2. Pemungutan pajak di KPP Salatiga selama tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002 seluruhnya efisien.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eka Febriana (2004) menemukan bahwa:

1. Dari hasil perhitungan efisiensi di KPP Kebumen maka penerimaan pajak di KPP Kebumen dapat dikategorikan sangat efisien ditunjukkan dengan nilai rata – rata efisiensi sebesar 0,57 (57%).

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak paling efektif dicapai pada tahun anggaran 1998/1999 dengan nilai efektifitas sebesar 0,99 (99,0 %)



BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 OBYEK/SUBYEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Timur selama kurun waktu lima tahun yaitu untuk tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun 2005.

3.2 DATA PENELITIAN

Sumber data yang digunakan meliputi :

- a. Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus yang diperoleh dari KPP Sidoarjo Timur untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa interview/wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Jenis data yang digunakan atau yang diperlukan meliputi :

- a. Rekapitulasi target, realisasi dan biaya penerimaan pajak tahun anggaran 2003/2004 sampai tahun 2005, serta pembanding untuk mengukur tingkat efisiensi.

- b. Berbagai laporan tahunan, majalah berita pajak, dan berbagai sumber hasil-hasil rapat di KPP Sidoarjo Timur yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan kegiatan langsung ke objek penelitian meliputi :

- a. Interview/wawancara

Interview/wawancara yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah atau hal-hal mengenai pajak dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan fiskus secara langsung.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengumpulan dokumen untuk penelitian berupa rekapitulasi target, realisasi, dan biaya penerimaan pajak dari KPP Sidoarjo Timur.

3.4 ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud secara deskriptif adalah menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori yang telah ada, sedangkan penelitian dilakukan dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh

Analisis yang akan digunakan untuk menghitung efisiensi pemungutan pajak dan efektifitas pajak di KPP Sidoarjo Timur sebagai berikut :

3.4.1 Mengukur Efisiensi

Efisiensi adalah mengukur bagian dari pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi lebih besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. (Devas Nick. 1989 : 146)

Rumus pengukuran efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Penerimaan pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan.

Apabila realisasi penerimaan pajak untuk tahun ini lebih besar dari pada biaya pemungutan pajak maka penerimaan pajak pada tahun ini dikatakan efisien.

Dikatakan efisien apabila tingkat efisiensinya lebih besar atau sama dengan 100%.

Dari metode Nick Devas ini, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang di lakukan yaitu :

- a. Apabila hasilnya < 20 % berarti sangat efisien.
- b. Apabila hasilnya antara 20 % sampai dengan 85 % berarti efisien.
- c. Apabila hasilnya > 85 % berarti tidak efisien.

3.4.2 Mengukur Efektifitas

Penerimaan pajak dapat dikatakan efektif apabila besarnya realisasi penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan. Pembahasan tentang

efektifitas pemungutan pajak selama tahun anggaran 2003/2004 sampai 2005 dilakukan secara keseluruhan atas jenis pajak PPh dan PPN.

Rumus pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Dikatakan efektif apabila tingkat efektifitasnya lebih besar atau sama dengan 100%.

Target penerimaan pajak dicari dengan cara :

- a. Realisasi tahun lalu dijadikan ukuran untuk menentukan target tahun berikutnya.
- b. Melihat potensi pajak daerah tersebut dan dihitung estimasi pajaknya.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1994, tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 90% sampai dengan 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif.
- e. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

3.4.3 Sedangkan untuk mengetahui mengetahui usaha-usaha dan faktor-faktor yang menghambat tercapainya penerimaan pajak di KPP Sidoarjo Timur

didapatkan melalui interview/wawancara dengan fiskus yang bersangkutan
berdasarkan data tahun 2003/2004 sampai dengan 2005.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBYEK/SUBYEK PENELITIAN

Perkembangan perekonomian yang begitu pesat di Kabupaten Sidoarjo ditandai dengan perubahan sektor-sektor usaha yang ada. Semula di wilayah ini usaha yang dominan adalah dibidang agraria khususnya persawahan dan perikanan (tambak), serta didukung industri kecil jenis makanan dan kerajinan rakyat. Dewasa ini Kabupaten Sidoarjo telah berkembang dan tumbuh seiring dengan berkembangnya industri-industri menengah besar, yang memproduksi barang-barang dengan tujuan ekspor, antara lain : industri kimia, karet plastik, barang dari logam, dan sebagainya. Perkembangan industri yang besar ini telah turut menarik tenaga kerja dari daerah lain, perpindahan penduduk yang masuk dan menetap di Kabupaten Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Timur dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KPP Sidoarjo Timur merupakan pemekaran dari KPP Sidoarjo yang dibagi menjadi KPP Sidoarjo Timur dan KPP Sidoarjo Barat.

KPP Sidoarjo Timur terletak di Jl. Pahlawan no 55 Sidoarjo Timur, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. KPP Sidoarjo Timur merupakan salah satu unit pelaksana fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan tugas nya dibawah koordinasi dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

Wilayah kerja KPP Sidoarjo Timur meliputi sembilan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kec. Porong, Kec. Jabon, Kec. Tanggulangin, Kec. Candi, Kec. Sidoarjo, Kec. Buduran, Kec. Sedati, Kec. Waru, Kec. Gedangan.

4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Mengukur Efisiensi

Pengukuran efisiensi penerimaan pajak dilakukan dengan membagi biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang didapatkan. Secara lengkap data biaya pemungutan pajak dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada lampiran---. Contoh perhitungan tingkat efisiensi pajak pada KPP Sidoarjo Timur dapat dilihat diawah ini:

$$\rightarrow \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} = \frac{2.175.690.000}{800.748.000.730} = 0.27\%$$

Penghitungan yang sama dilakukan untuk tahun – tahun berikutnya. Selengkapnya, hasil perhitungan tingkat efisiensi pajak pada KPP Sidoarjo untuk tahun 2003/2004 sampai dengan 2005 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur

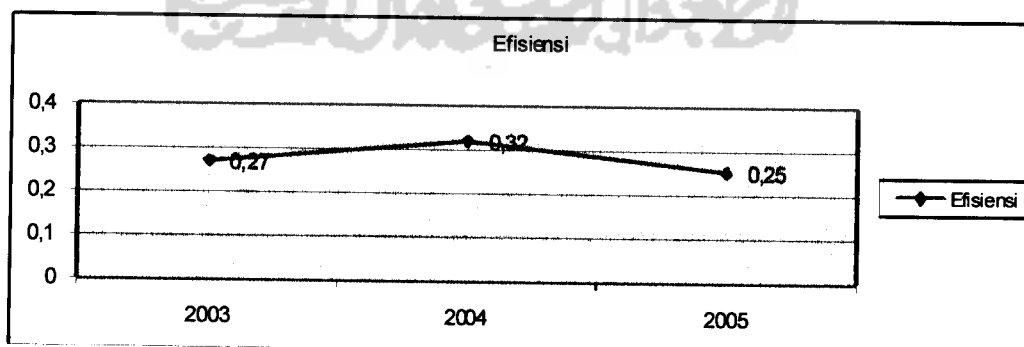
Tahun Anggaran	Biaya Pungutan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efisiensi (%)	Keterangan
2003	Rp.2.175.690.000	Rp.800.748.000.730	27	Efisien
2004	Rp.2.577.845.000	Rp.793.948.000.520	32	Efisien
2005	Rp.2.350.985.000	Rp.909.751.000.850	25	Efisien
Rata- Rata	-	-	28	Efisien

Sumber : Bag. LPP KPP Sidoarjo Timur (data diolah)

Sedangkan grafik 4.1 tentang Efisiensi Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur adalah sebagai berikut :

Grafik 4.1

Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur



Dari tabel dan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pajak di KPP Sidoarjo Timur pada tahun 2003 sebesar 27% dan terjadi peningkatan pada tahun 2004 menjadi 32%. Angka ini kemudian turun lagi pada tahun 2005 menjadi 25%. Bila dibandingkan dengan standar efisiensi bahwa tingkat efisien lebih kecil dari 20% termasuk pada kategori sangat efisien maka dapat dikatakan pemugutan pajak pada KPP Sidoarjo Timur untuk tahun 2003/2004 hingga 2005 sangat efisien.

4.2.2 Mengukur Efektivitas

Di bawah ini tabel 4.2 tentang perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur.

Tabel 4.2

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efektivitas (%)	Keterangan
2003	Rp.1.210.182.910.000	Rp.800.748.000.730	66,17	Kurang efektif
2004	Rp.1.228.661.890.000	Rp.793.948.000.520	64,61	Kurang efektif
2005	Rp.907.777.520.000	Rp.909.751.000.850	100,21	Sangat efektif
Rata- Rata	-	-	77,17	Kurang efektif

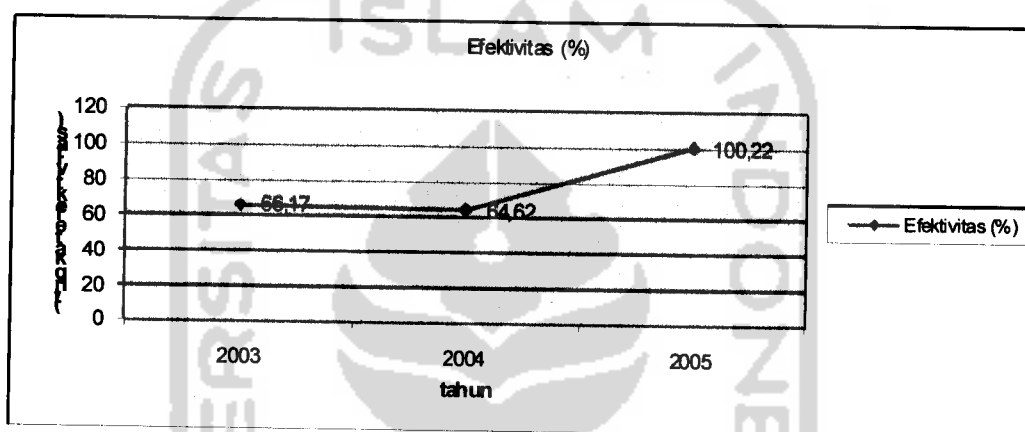
Sumber : Bag. LPP KPP Sidoarjo Timur (data diolah)

Sedangkan grafik 4.1 tentang Efisiensi Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo

Timur adalah sebagai berikut :

Grafik 4.2

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Sidoarjo Timur



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam akhir penelitian ini akan disampaikan beberapa kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KPP Kebumen dalam membuat berbagai kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan efisiensi di KPP Sidoarjo Timur maka penerimaan pajak di KPP Sidoarjo Timur dapat dikategorikan sangat efisien dengan tingkat efisiensi dari tahun 2003/2004 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 25 %-32 % dengan tingkat rata-rata efisiensi di KPP Sidoarjo Timur sebesar 28 % yang berarti biaya pungutan yang dikeluarkan oleh KPP Sidoarjo Timur dapat ditekan dengan realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak paling efisien dicapai pada tahun 2004 yang mencapai 32 %.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas di KPP Sidoarjo Timur dari tahun 2003/2004 sampai dengan 2005 berkisar antara 64,61 % - 100,21 % dengan

rata-rata efektivitas 77,17 %. Penerimaan pajak paling efektif dicapai pada tahun 2005 sebesar 100,21 %.

3. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya penerimaan pajak di KPP Sidoarjo Timur adalah :

a. Faktor Eksternal

- Masuknya investasi baru di wilayah KPP Sidoarjo Timur yang juga memberikan dampak bertambahnya lapangan pekerjaan.
- Peningkatan jumlah impor bahan baku maupun barang modal
- Wajib Pajak tertib baik dalam melaporkan maupun menyetorkan pajaknya secara rutin.

b. Faktor Internal

- Fasilitas pendukung dan teknologi informasi perpajakan sudah cukup memadai.
- Pegawai KPP sudah menjalankan fungsi pengawasan dan sosialisasi dengan baik, contohnya dengan menerbitkan Surat Teguran Pajak bila Wajib Pajak lalai melapor atau membayar.
- Motivasi dalam bekerja yang baik.
- Peningkatan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak.

4. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak di KPP

Sidoarjo Timur

a. Faktor Eksternal

- Wajib Pajak masih banyak yang tidak benar dalam melaporkan pajaknya, karena dengan adanya self assesment system dalam pelaporan menyebabkan harus ada pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.
- Banyak calon wajib pajak yang potensial belum mempunyai NPWP, sehingga selain pajaknya tidak masuk ke negara juga membuat Wajib Pajak yang sudah terdaftar enggan untuk patuh karena negara merasa melakukan hal yang tidak adil.
- Pengetahuan Wajib Pajak tentang Perpajakan masih rendah.
- Banyaknya demonstrasi buruh yang menyebabkan kegiatan usaha berhenti.

b. Faktor Internal

- Kuantitas SDM yang kurang dibandingkan dengan beban kerja.
- Data base Wajib Pajak yang tidak sesuai, sehingga banyak SPT Tahunan yang tidak sampai kepada Wajib Pajak.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas lima tahun yaitu tahun anggaran 2003/2004 sampai dengan tahun 2005.
2. Dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan perbandingan analisis dengan KPP yang lain.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di satu KPP yaitu KPP Sidoarjo Timur saja.

5.3 SARAN

Agar upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Sidoarjo Timur yang dicapai dapat lebih ditingkatkan, maka beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

1. Hendaknya pihak KPP Sidoarjo Timur meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa Wajib Pajak terutama pada bulan-bulan menjelang akhir tahun.
2. Pihak KPP Sidoarjo Timur sedapat mungkin melakukan bedah wajib pajak untuk mengetahui potensi pajak yang belum tergali dan mengusulkan Wajib Pajak yang berpotensi untuk diperiksa.
3. Peningkatan pengetahuan staf di bidang pajak melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang pajak sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terus berlangsung.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menyediakan data pembanding dalam melakukan analisis data serta menyinggung variabel lain.
5. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan diwaktu yang akan datang dengan tahun anggaran dan tempat penelitian yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Basuki, 2004, *Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Salatiga*, Fakultas Ekonomi UMY, Yogyakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Eka Febriana, 2004, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak*, Studi Kasus di KPP Kebumen, Fakultas Ekonomi UMY, Yogyakarta.
- Kesit Bambang Prakosa, 2006, *Hukum Pajak*, UII Press, Yogyakarta.
- Liberty Pandiangan, 2002, *Urgensi Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muqodim, 2004, *Modul Perpajakan*, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan, 2002 : 114, *Management Control System*, Diterjemahkan oleh Drs. F.X Kurniawan Tjakrawala, M. Si, Ak, Edisi 1, PT Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Suryadi, 2004, *Monografi Fiskal KPP Sidoarjo Timur*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak.
- Suryadi, 2005, *Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Sidoarjo Timur*, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Timur.

LAMPIRAN 1

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2003 KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR

(dalam jutaan rupiah)

NO	JENIS PAJAK	Rencana 2003	Realisasi s/d Des '03	% (4/3)
1	2	3	4	5
A	PAJAK PENGHASILAN			
1.	PPh Non Migas			
	1.1 PPh Pasal 21	151,539.14	100,547.95	66.35
	1.2 PPh Pasal 22	20,799.46	6,282.18	30.20
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	90,018.09	75,826.82	84.24
	1.4 PPh Pasal 23	33,567.00	26,932.25	80.23
	1.5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6,939.01	4,101.38	59.11
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	103,593.00	61,335.79	59.21
	1.7 PPh Pasal 26	26,824.00	8,976.54	33.46
	1.8 PPh Final Dan Fiskal LN	48,578.00	41,596.81	85.63
	1.9 PPh Non Migas Lainnya	-	43.46	0.00
2.	PPh Migas	-	-	-
	2.1 PPh Minyak Bumi	-	-	-
	2.2 PPh Gas Alam	-	-	-
	2.3 PPh Lainnya dari Minyak Bumi	-	-	-
	2.4 PPh Lainnya dari Gas Alam	-	-	-
	JUMLAH A	481,857.70	325,643.18	67.58
B	PPN DAN PPnBM			
	1. PPN Dalam Negeri	389,986.00	255,092.09	65.41
	2. PPN Impor	297,496.94	188,699.42	63.43
	3. PPnBM Dalam Negeri	31,118.00	6,097.96	19.60
	4. PPnBM Impor	1,729.00	17,523.45	1013.50
	5. PPN & PPnBM Lainnya	-	193.88	0.00
	JUMLAH B	720,329.94	467,606.71	64.92
C	PAJAK LAINNYA			
	1. Bea Materai	7,558.27	7,450.54	98.57
	2. Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	-	-
	3. Bunga Penagihan PPh	430.00	42.24	9.82
	4. Bunga Penagihan PPN & PTLL	7.00	6.06	86.57
	5. BPP	-	-	-
	6. Pemberian Imbalan Bunga	-	-	-
	JUMLAH C	7,995.27	7,498.84	93.79
D	Jumlah Bruto (A + B +C)	1,210,182.91	800,748.73	66.17

Sumber dari LPP (data diolah)

LAMPIRAN 2

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2004 KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR

(dalam jutaan rupiah)

NO	JENIS PAJAK	Rencana 2004	Realisasi s/d Des '04	% (4/3)
1	2	3	4	5
A	PAJAK PENGHASILAN			
1.	PPh Non Migas			
	1.1 PPh Pasal 21	107,808.42	118,520.80	109.94
	1.2 PPh Pasal 22	49,819.54	6,545.80	13.14
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	72,675.35	63,837.22	87.84
	1.4 PPh Pasal 23	57,909.29	26,816.33	46.31
	1.5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6,321.15	4,145.59	65.58
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	128,671.95	54,606.06	42.44
	1.7 PPh Pasal 26	43,639.73	8,834.80	20.24
	1.8 PPh Final Dan Fiskal LN	63,627.52	37,428.77	58.82
	1.9 PPh Non Migas Lainnya	-	-	-
2.	PPh Migas			
	2.1 PPh Minyak Bumi	-	17.60	0.00
	2.2 PPh Gas Alam	-	-	-
	2.3 PPh Lainnya dari Minyak Bumi	-	-	-
	2.4 PPh Lainnya dari Gas Alam	-	-	-
	JUMLAH A	530,472.95	320,752.97	60.47
B	PPN DAN PPnBM			
	1. PPN Dalam Negeri	362,070.81	219,990.09	60.76
	2. PPN Impor	290,701.39	240,549.15	82.75
	3. PPnBM Dalam Negeri	32,928.14	543.39	1.65
	4. PPnBM Impor	1,842.99	2,087.46	113.26
	5. PPN & PPnBM Lainnya	-	651.42	0.00
	JUMLAH B	687,543.33	463,821.51	67.46
C	PAJAK LAINNYA			
	1. Bea Materai	10,142.11	8,518.92	84.00
	2. Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	225.88	0.00
	3. Bunga Penagihan PPh	496.15	310.56	62.59
	4. Bunga Penagihan PPN & PTLL	7.37	318.67	4323.88
	5. BPP	-	-	-
	6. Pemberian Imbalan Bunga	-	-	-
	JUMLAH C	10,645.63	9,374.03	88.06
D	Jumlah Bruto (A + B +C)	1,228,661.91	793,948.51	64.62

Sumber dari LPP (data diolah)

LAMPIRAN 3

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2005 KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR

(dalam jutaan rupiah)

NO	JENIS PAJAK	Rencana 2005	Realisasi s/d Des '05	% (4/3)
1	2	3	4	5
A	PAJAK PENGHASILAN			
1.	PPh Non Migas			
	1.1 PPh Pasal 21	104,798.89	113,528.58	108.33
	1.2 PPh Pasal 22	34,073.17	8,108.36	23.8
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	102,720.94	71,764.31	69.86
	1.4 PPh Pasal 23	66,997.97	32,150.52	47.99
	1.5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4,362.06	4,988.81	114.32
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	65,066.66	68,968.67	106
	1.7 PPh Pasal 26	34,718.28	10,233.37	29.48
	1.8 PPh Final Dan Fiskal LN	76,171.64	40,732.40	53.47
	1.9 PPh Non Migas Lainnya	-	0.03	0
2.	PPh Migas			
	2.1 PPh Minyak Bumi	19.36	1.66	100
	2.2 PPh Gas Alam	-	0.37	0
	2.3 PPh Lainnya dari Minyak Bumi	-	-	0
	2.4 PPh Lainnya dari Gas Alam	-	-	0
	JUMLAH A	488,928.97	350,474.88	71.68
B	PPN DAN PPnBM			
	1. PPN Dalam Negeri	190,489.09	245,015.07	128.62
	2. PPN Impor	209,058.87	299,750.21	143.38
	3. PPnBM Dalam Negeri	865.57	1,211.80	140
	4. PPnBM Impor	2,563.56	3,158.29	123.2
	5. PPN & PPnBM Lainnya	983.9	20.57	100
	JUMLAH B	403,960.99	549,155.94	135.94
C	PAJAK LAINNYA			
	1. Bea Materai	13,370.82	10,032.57	75.03
	2. Pajak Tidak Langsung Lainnya	440.51	6.07	100
	3. Bunga Penagihan PPh	533.66	20.58	3.86
	4. Bunga Penagihan PPN & PTL	542.57	62.96	11.6
	5. BPP	-	-1.15	0
	6. Pemberian Imbalan Bunga	-	-	0
	JUMLAH C	14,887.56	10,121.03	67.98
D	(Jumlah A + B + C)	907,777.52	909,751.85	100.22

Sumber dari LPP (data diolah)

LAMPIRAN 4

BIAYA PUNGUTAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Jumlah
2003	1,225,356,000	950,334,000	2,175,690,000
2004	1,366,275,000	1,211,570,000	2,577,845,000
2005	1,598,184,000	752,801,000	2,350,985,000



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR

Jalan Pahlawan No.55
Sidoarjo – 61212

Telp (031) 8962890
Fax (031) 8941035

Nomor : S- 01/WPJ.24/KP.02/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) sct.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

18 Januari 2007

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA

Berkenaan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Nomor : 357/DEK/10/Div.Um/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 hal : Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Redo Mulyadi
No. Mahasiswa : 02312241
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 8.5 Perum Dayu Permai

benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi pada kantor pelayanan pajak Sidoarjo Timur, dengan judul : **ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SIDOARJO TIMUR.**

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor,

Dr. Suryadi, MM
NIP. 060049793.

Tembusan :
Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si
(dosen Pembimbing).